



# Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. AP. Mangkunegoro Tenggarong Telp. (0541) 661009 - 113 Fax 661009

Web Site: <a href="http://bpbd.kutaikartanegarakab.go.id/">http://bpbd.kutaikartanegarakab.go.id/</a>
Email: <a href="bpbd.kab.kutaikartanegara@gmail.com">bpbd.kab.kutaikartanegara@gmail.com</a>

TENGGARONG

# KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor: 188/*034*/SK-RENSTRA/BPBD/09/2021

#### **TENTANG**

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026

# KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang:

- a. bahwa bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 10. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19. Kepmendagri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra BPBD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

KETIGA : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja

(Renja) BPBD Tahun 2021 - 2026.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud danTujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat

Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi

Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Kaltim

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

**PENDANAAN** 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada tanggal : September 2021

Kepala Pelaksana,

<u>Drs. H. MARSIDIK</u> Pembina Utama Muda

NIP. 19620403 198703 1 020

Nama	Jabatan	Paraf
Edy Mardian, SE	Sekretaris	6
Opyarsha Wardana, SE., M.Si	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	#
Noor Ramsyah, SE	Penyusun Naskah	1.

# INSTRUMEN VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022-2026

# PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

	URAIAN VERIFIKASI  Sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:		KESESUAIAN			TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN	
NO			YA	TIDAK			
1			√		- :	Lakukan perbaikan pada beberapa narasi yang sdh ditandai Sesuaikan Ig daftar isi dengen halaman Nomor bab, sb bab dan sub-sub bab sesuaikan SURAT EDARAN Nomor: B 984/BAPP/ o65-11/05 /2021	
	BAB. I.	PENDAHULUAN					
	1,1	Latar Belakang	√	-		Dorah Nomor 6	
	1,2	Landasan Hukum	✓	-		Ditambahkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026  Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi	
			<u> </u>		_	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	1,3	Maksud dan Tujuan	1 1				
	1,4	Sistematika Penulisan	_				
	BAB.	II. GAMBARAN PELAYANAN					
	2,1	NGKAT DAERAH  Tugas, Fungsi dan Struktur  Organisasi Perangkat Daerah	-		/	Untuk Subbab 2.1.3 SOTK halaman 11 sertakan bidang Pengendalian dan pemadaman kebakaran sesuai bidang tugas halaman 21 dan 24	
	2,2	Sumberdaya Perangkat Daerah	,	/			
	2,3	Kinerja pelayanan Perangkat					
		Daerah  Tabel T-C.23. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	а	-	√ 	<ul> <li>Tabel 9 diberi judul TC.23 (hal. 31 dst)</li> <li>Hanya mencamtumkan kinerja program,</li> <li>20017-2021 diberi tanda centang pada kolom</li> <li>yg sesuai (NSPK, IKK &amp; lainnya /SPM)</li> <li>Untuk kinerja 2021 realisasi s/d tw.2</li> </ul>	
		Tabel T-C.24. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah		-	√	- Tabel 10 halmn 38 diberi judul TC, 24 - Target capaian diisi s/d 2021 tw 2.	
	2,4	Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah		<b>√</b>	<u>-</u>		
	BA STI	B. III. PERMASALAHAN DAN ISU-I RATEGIS PERANGKAT DAERAH	SU				
	3,	berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah		√	•	Telaah visi misi masih yang lama (2016-202	
	3.	2 Telaahan, visi,misi dan prograt Kepala Daerah dan Wakil Kep Daerah terpilih	m ala		<b>√</b>	tion dongen Visi missi Bubdu dan wan	

# BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 bertempat di Ruang Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Kantor BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama disepakati bahwa diperlukan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- Penyesuaian indikator dan Target Kinerja Program berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- 2. Penyesuaian alokasi pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- 3. Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2021-2026 sesuai hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD tahun 2021-2026.

Menyetujui Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

H. Fahmi, SE., M.Si

NIP. 19770128 200701 1015

Verifikator

Kasubbid Perencanaa Sosial

Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat,

Maryono, SP, M.Si

NIP. 19690304 200112 1001

Perwakilan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Program & Keuangan Kepala

Opyarsha Wardana, SE., M.Si NIP. 19721129 200112 1003

	3,4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√	-	
-	3,5	Penentuan isu-isu strategis	V	-	
	BAB I	v. Tujuan dan sasaran			
	4,1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	√	-	
		Tabel T-C.25. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah	√	-	
		V. STRATEGI DAN ARAH JAKAN			
		Tabel T-C.26. Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan	√	-	Laborator CC
	BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN				Narasi program dan kegiatan halaman 66- 68 disesuaikan dengan isinya TC 27 pada halaman selanjutnya
		Tabel T-C.27. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah	-	<b>√</b>	<ul> <li>Tabel 17 diberi judul TC 27.</li> <li>Anggaran program 2023,2025 belum diisi</li> <li>Sesuaikan dengan pagu, indicator dan targer program yg dikirim BAPPEDA</li> </ul>
		S VII. KINERJA PENYELENGGARAAN ANG URUSAN			
		Tabel T-C.28. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	<b>√</b>	-	
	BAI	B VIII. PENUTUP	√	-	
3	Rui	musan rencana program, indikator, n target berdasarkan RPJMD	V	-	
4	Ke	sesuaian Program/Kegiatan/Sub giatan dengan Pencapaian SPM	√	-	Menjadi sub kegiatan prioritas setelah wajib mengikat
5	Ke	sesuaian Program/Kegiatan/Sub giatan dengan Pencapaian Target ogram Dedikasi Kukar Idaman	√	-	

2000		- 01		
M	on	aet	ah	ui,
14	CII	800	Cit i	419

iggulangan Bencana Daerah Program dan Keuangan Kasubba

Wardana, SE., M.Si

NIP. 1972 129 200112 1003

Tim Verifikasi:

Kabid Perenc. Sosial Budaya dan Pemerintahan

H. Fahmi, SE., M.Si

NIP. 19770128 200701 1 015

Kasubbid Perenc. Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Maryono, SP., M.Si

NIP. 19690304 200112 1001



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan Inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program,dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan oleh karenanya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan sehingga Penangulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara pada gilirannya nanti dapat dilakukan secara optimal.

Kepala Pelaksana,

<u>Drs. H. MARSIDIK</u>

**204**03 198703 1 020



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# **DAFTAR ISI**

Н	la	lar	n	a	r	1

Surat Kepu	tusan (SK) RENSTRA Tahun 2021-2026	
Lembar Bei	ita Acara Verifikasi RENSTRA Tahun 2021-2026 oleh BAPPEDA	
Lembar Ha	sil Reviu RENSTRA Tahun 2021-2026 oleh INSPEKTORAT	
Halaman Ju	ıdul	I
Kata Penga	ntar	. ii
Daftar Isi		. iii
Daftar Tabe	<u>-</u>	iv
Daftar Gam	bar	. v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
	1.4. Sistematika i chunsan	)
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN ORGNISASI PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	7
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .	42
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi	
	Perangkat Daerah	42
	3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	,-
	Daerah Terpilih	46
	3.3 Telaahan Renstra K/L	48
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai	40
		40
	Kartanegara (2013 – 2033)	49
	3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII	PENUTUP	92



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# **DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	23
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	23
3	Jumlah Pejabat Struktural	24
4	Jumlah Tenaga Honor/Tenaga Harian Lepas Menurut Tingkat Pendidikan	24
5	Jumlah Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah	
	mengikuti Pendidikan dan Latihan	24
6	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dimiliki Oleh Badan	
	Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	25
7	Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat Dan Roda Enam yang	
	Dimiliki Oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai	
	Kartanegara	25
8	Sarana dan Prasarana berupa asset / tanah / peralatan/perlengkapan	25
9	Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28
10	Anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah	29
11	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran	
	pembangunan daerah	45
12	Rencana Strategis K/L	48
13	Tujuan dan sasaran perangkat daerah	60
14	Faktor Internal dan eksternal	64
15	Penghitung bobot dan rating	65
16	Strategi dan kebijakan Jangka menengah BPBD Kab. Kutai Kartanegara	
47	Tahun 2016-2021	69
17	Rencana Program, Kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan	74
18	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan	74
	Sasaran RPJMD	88





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Halaman
1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	22
2	Peta Risiko Multi Bahaya Kabupaten Kutai Kartanegara	55
3	Diagram SWOT	63



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. Latar belakang

Penanggulangan merupakan salah bencana satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyusun suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waltu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra-PD harus



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni" "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia". Proses penyusunan dokumen renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang akan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

di evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

## 1.2. Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 sebagai berikut:

- Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 10) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 19) Kepmendagri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
- 22) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

# 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasional untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana stategis ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Strategis disusun dengan maksud sebagai berikut:

- Memberikan acuan atau pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- 2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
- 3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk RPJMD.
- 4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
- 5. Memudahkan aparatur dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis yang ingin dicapai adalah:

- 1. Mengidentifikasikan daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.
- 2. Memberikan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan perangkat pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud danTujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Kaltim
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun nonstruktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain ;(a) Melindungi masyarakat..." dan (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat...." Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

bahwa; (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

# **2.1.1.** Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan dan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan pnyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# **2.1.2.** Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
- b) Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# 2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturah Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merevisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yaitu mengembalikan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara untuk uraian tugas pejabat strukturalnya diatur Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara., maka organisasinya terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Unsur Pengarah;dan
- 3. Kepala Pelaksana;
- 4. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Urnum dan Ketatalaksanaan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 5. Bidang Pencagahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pencegahan;dan
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- 6. Bidang Kedaruratan dan logistik, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Kedaruratan;dan
  - b. Sub Bidang Logistik;
- 7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan
  - a. Sub Bidang ehabilitasi;dan
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 8. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Oprasional; dan
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Bupati Kutai Kartanegara mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu Sekretaris dan empat kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

- a) Tata Kerja Kepala Pelaksana, yang meliputi:
  - 1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
  - 2. Merumuskan kebijakan teknis Badan;
  - 3. Merumuskan rencana program kerja Badan
  - 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Badan
  - 5. Merumuskan kebijakan administrasi Badan
  - 6. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Badan
  - 7. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
  - 8. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
  - 9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM urusan Kepala Badan;dan
  - 10. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Tata Kerja Sekretaris, yang meliputi:
  - 1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Simtem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- 8. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
- 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- 11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan Badan
- 12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- c) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi :
  - 1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan Ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi: menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Merencanakan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan, *survey index* kepuasan masyarakat, *survey internal* organisasi dan *survey index* nilai persepsi korupsi;
- 6. Melaksanakan administrasi umum meliputi: ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
- 8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum dan Ketatalaksanaan; dan
- 9. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi:
  - 1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - 2. menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 3. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN / LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 4. merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- 5. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP urusan Kepegawaian;
- 6. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
- 7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
- 8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e) Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:
  - 1. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - 2. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 3. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui sekretaris Badan:
  - 4. merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
  - 5. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP),dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
  - 6. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
  - 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
  - 8. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
  - 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f) Tata Kerja Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi :
  - 1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pencagahan dan Kesiapsiagaan meliputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana dan prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- 4. Mengkoordinasikan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana dan prakebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- 5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 6. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan latihan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 8. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 9. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- 10. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### g) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Pencegahan meliputi:

- 1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. menyusun rencana kegiatan urusan Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait urusan Pencegahan;
- 4. Merencanakan dan melaksanakan Inspeksi Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran Bagi Bangunan Gedung;
- 5. Merencanakan dan melaksanakan Inspeksi Penggunaan Peralatan Pemadam Api Ringan (APAR);
- 6. Merencanakan dan membuat Rencana Kontijensi Bencana, Peta Rawan Bencana, Peta Rawan Kebakaran Perumahan dan Pemukiman;
- 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pencegahan;
- 8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Pencegahan;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan; dan
- 10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

# h) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan meliputi:

- 1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait urusan kesiapsiagaan;
- 4. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 5. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 6. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kesiapsiagaan;
- 7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kesiapsiagaan;
- 8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesiapsiagaan; dan
- 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## i) Tata Kerja Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik meliputi :

- 1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kedaruratan dan logistik meliputi Kedaruratan dan logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja dengan stakeholder di bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kedaruratan dan logistik;
- 6. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kedaruratan dan logistik;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 7. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan dan logistik; dan
- 8. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

# j) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Kedaruratan meliputi:

- 1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. menyusun rencana kegiatan urusan Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. merencanakan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan:
- 4. merencanakan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops);
- 5. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan kedaruratan pada saat keadaan darurat dan penanganan pengungsi;
- 6. merencanakan kegiatan dan pengerahan petugas penyelamatan pada saat darurat bencana dan kebakaran;
- 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kedaruratan;
- 8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kedaruratan;
- 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan; dan
- 10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

#### k) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Logistik meliputi :

- 1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. menyusun rencana kegiatan urusan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan logistik pada saat darurat bencana dan kebakaran;
- 4. merencanakan kegiatan Pengelolaan dan Pendistribusian Dukungan Logistik;
- 5. merencanakan kegiatan dan pengerahan petugas Pendistribusian Dukungan Logistik pada saat darurat bencana dan kebakaran;
- 6. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Logistik;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 7. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Logistik;
- 8. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Logistik;
- 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

# l) Tata Kerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- 1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitas dan rekonstruksi pada pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 5. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 7. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- 8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### m) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Rehabilitasi meliputi:

- 1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan rehabilitasi pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan rehabilitasi pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 5. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rehabilitasi;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 6. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rehabilitasi;
- 7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi; dan
- 8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

# n) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Rekonstruksi meliputi:

- 1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan rekonstruksi pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan rekonstruksi pasca bencana dan pasca kebakaran;
- 5. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Rekonstruksi;
- 6. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Rekonstruksi;
- 7. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rekonstruksi; dan
- 8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

## o) Tata Kerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meliputi:

- 1. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemadam Kebakaran meliputi Oprasional dan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Mengkoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran Perumahan dan Permukiman;
- 4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pemadam Kebakaran Perumahan dan Permukiman;
- 5. mengkoordinasikan kebutuhan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran;
- 6. Mengkoordinasikan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan Serta Personil pada saat pemadaman dan pengendalian kebakaran perumahan dan permukiman, serta penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 7. Mengkoordinasikan rencana dan penentuan teknis kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) personil petugas pemadam kebakaran perumahan dan permukiman;
- 8. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemadam Kebakaran;
- 9. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemadam Kebakaran;
- 10. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemadam Kebakaran; dan
- 11. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

# p) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Oprasional meliputi:

- 1. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2. Menyusun rencana kegiatan urusan Oprasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan Oprasional;
- 4. Merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan Oprasional;
- 5. Merencanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengerahan Peralatan Serta Personil pada saat pemadaman kebakaran, pengendalian kebakaran perumahan dan permukiman, dan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- 6. Merencanakan dan menentukan teknis kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) personil petugas pemadam kebakaran perumahan dan permukiman;
- 7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Oprasional;
- 8. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Oprasional;
- 9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Oprasional; dan
- 10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### q) Tata Kerja Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana meliputi:

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 2. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. merencanakan kegiatan pelaksanaan perumusan kebijakan urusan Sarana dan Prasarana;
- 4. merencanakan kegiatan dan Melaksanakan hubungan kerja urusan Sarana dan Prasarana:
- 5. merencanakan kegiatan dan menganalisis kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan latihan pemadam kebakaran;
- 6. Merencanakan kegiatan dan menentukan teknis pengadaan kebutuhan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan Sarana dan Prasarana kebakaran perumahan dan permukiman;
- 7. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Sarana dan Prasarana;
- 8. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Sarana dan Prasarana;
- 9. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sarana dan Prasarana; dan
- 10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- r) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku

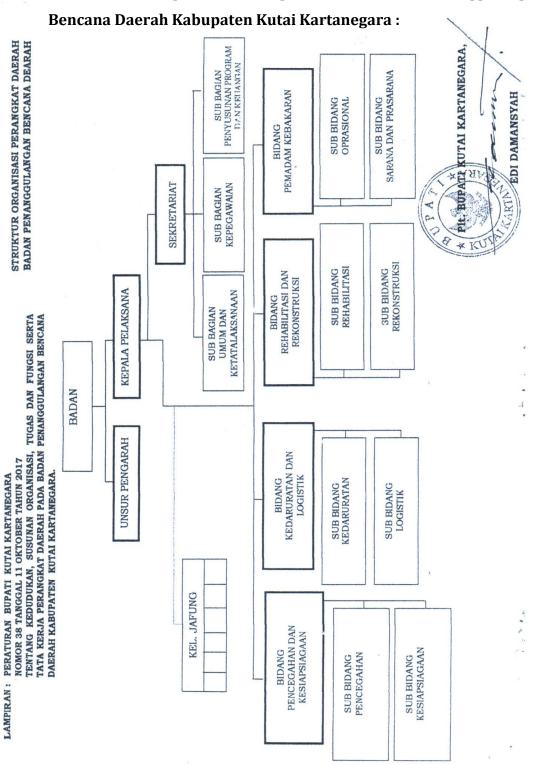




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan



Gambar.1. Struktur Perangkat Daerah BPBD

Sumber Data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian BPBD Tahun 2021





Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

# 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol.	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	1	-	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	4	-	3
5.	Pembina	IV/A	5	-	5
6.	Penata Tingkat I	III/D	6	1	7
7.	Penata	III/C	5	3	8
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	3	-	3
9.	Penata Muda	III/A	4	-	4
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	8	1	9
11.	Pengatur	II/C	23	5	28
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	17	5	22
13.	Pengatur Muda	II/A	7	-	7
14.	Juru Tingkat I	I/D	2	-	2
15.	Juru	I/C	-	-	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	2	-	2
17.	Juru Muda	I/A	-	-	0
	Jumlah		85	15	100

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	9	-	9
3.	Sarjana (S1)	17	4	21
4.	Sarjana Muda	1	-	1
5.	SLTA/SMU	53	11	64



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

6.	SLTP	1	-	1
7.	Sekolah Dasar	4	-	4
	Jumlah	85	15	100

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Esselon II/B	-	-	-
2.	Esselon III/A	1	-	1
3.	Esselon III/B	3	-	3
4.	Esselon IV/A	8	1	9
	Jumlah	12	1	13

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 4. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	32	10	42
4.	Sarjana Muda	3	1	4
5.	SLTA/SMU	152	16	168
6.	SLTP	7	-	7
7.	Sekolah Dasar	3	-	3
	Jumlah	197	27	224

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 5. Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	
5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## 2.2.2. Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2.	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
	JUMLAH	8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan Tahun 2021

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan Tahun 2021

Tabel 8. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumla h	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	
		1	Kurang Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumla h	Kondisi	Ket.
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompor Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	10	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
56. 59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili		+	
		1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	11	Baik	





## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumla h	Kondisi	Ket.
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	
88.	Compressor	1	Baik	
89.	FilterCompressor	5	Baik	
90.	Minyak nabati	8	Baik	
91.	Mesin Boat	3	Baik	
02	D.I.I. D. /	2	Baik	
92.	Rubber Boat	1	Kurang Baik	
93.	Speed Boat dan Mesin	1	1	
94.	Tangki BBM	3	3	
95.	Life Jacket	5	5	
96.	Badan Ces	1	Kurang Baik	
97.	Mesin Ces	1	Baik	
		2	Baik	
98.	Tenda	5	Kurang Baik	
99.	Tali	3	3	
100	Velm Bed	23	Baik	
		1	Kurang Baik	
101	Kantong mayat	21	21	
102	Tandu	1	1	
103	Terpal	9	9	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan Tahun 2021





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 9.

# T-C.23.

## Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	_	Target Indikator	Target	Renstra I	Perangkat Ke-	: Daerah <sup>-</sup>	Гаhun	F	Realisasi	Capaian	Tahun K	e-		Rasio Cap	oaian pada	
				Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Resiko Bencana		110		132	123	114	108	102	132	91	75	59	102	132	91	75	59	102
2	Response Time Rate (Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK)		Menit		25	25	25	25	25	25	24	22	21	20	25	24	22	21	20





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## Tabel 10. T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		F	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					antara Re	Rata-Rata Pertumbuhan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	750.00 0.000	365.000. 000	144.000. 000	1.998.50 6.000	-	696.539 .975	-	129.873. 500	1.972.0 18.620	-						1.442. 626.5 00	1.295.99 5.424
Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	-	-	1.075.00 0.000	813.000. 000				1.064.31 3.200	757.664. 600		-	-	99,01	93,19		472.0 00.00 0	455.494. 450
Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	-	-	-	275.000. 000					271.804. 200		-	-	-	98,84		68.75 0.000	67.951.0 50
Layanan Pencegahan dan Penyelamatan pada Kondisi Non Kebakaran	-	-	-	350.000. 000					291.767. 600		-	-	-	83,36		87.50 0.000	72.941.9 00
Pengadaan kendaraan	-	-	-	1.798.50					1.787.42		-	-	-	99,38		449.6	446.856.





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		I	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata ımbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
penanggulangan kebakaran				6.000					7.620							26.50 0	905
Pemenuhan Sarana Damkar	750.00 0.000	365.000. 000	144.000. 000	200.000. 000		696.539. 975	-	129.873. 500	184.591. 000		92,87	-	90,19	92,30		364.7 50.00 0	252.751. 119
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	440.47 0.650	265.574. 000	479.000. 000	1.250.74 7.000	-	169.448 .000	121.333 .500	450.458. 200	1.171.3 41.094	-						608.9 47.91 3	478.145. 199
Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan		111.574. 000	179.000. 000				96.333.5 00	171.637. 600			-	86,34	95,89	-		72.64 3.500	66.992.7 75
Sosialisasi dan Penyuluhan kebencanaan	240.47 0.650					-					-	-	-	-		60.11 7.663	-
Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	200.00	104.000. 000	200.000. 000	450.000. 000		169.448. 000	-	183.231. 800	430.642. 400		84,72	-	91,62	95,70		238.5 00.00 0	195.830. 550
Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan		***************************************	100.000. 000	747.000				95.588.8 00	747.000		-	-	95,59	100,00		25.18 6.750	24.083.9 50
Sekolah Siaga Bencana		50.000.0					25.000.0				-	50,00	-	-		12.50	6.250.00





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ran Pada Ta	hun Ke-		I	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata Imbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
		00					00									0.000	0
Penyusunan Kajian Risiko Bencana ( KRB )				800.000. 000					739.951. 694		-	-	-	92,49		200.0 00.00 0	184.987. 924
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana																-	-
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	3.100. 000.00 0	2.070.00 0.000	1.872.49 5.500	2.003.60 0.000	-	2.713.3 26.000	2.026.8 07.530	1.355.38 5.880	1.698.3 87.180	-						2.261 .523. 875	1.948.47 6.648
Tangap darurat bencana kebakaran	1.300.0 00.000	950.000. 000				1.298.40 5.000	943.763. 000				-	99,34	-	-		562.5 00.00 0	560.542. 000
Tanggap Darurat Bencana Alam/non alam	750.00 0.000	650.000. 000	750.000. 000			745.798. 550	647.766. 800	647.766. 800			-	99,66	86,37	-		537.5 00.00 0	510.333. 038
Pembersihan dan Penyemprotan Lokasi Pasca Bencana Tanah Longsor			422.495. 500					272.341. 350			-	-	64,46	-		105.6 23.87 5	68.085.3 38





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ran Pada Ta	ıhun Ke-		I	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		ta-Rata imbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana				200.000. 000					165.566. 800		-	-	-	-		50.00 0.000	41.391.7 00
Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana				717.600. 000					700.665. 800		-	-	-	-		179.4 00.00 0	175.166. 450
Pengerahan peralatan/logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar	500.00 0.000	470.000. 000	700.000. 000	1.086.00 0.000		489.732. 450	435.277. 730	435.277. 730	832.154. 580		-	92,61	62,18	-		689.0 00.00 0	548.110. 623
Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	550.00 0.000					179.390. 000					-	-	-	-		137.5 00.00 0	44.847.5 00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	150.00 0.000	-	479.787. 800	701.718. 960	-	149.729 .700	-	460.725. 600	629.229 .100	-						332.8 76.69 0	309.921. 100
Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana	150.00 0.000		200.000. 000	294.518. 960		149.729. 700		199.311. 000	274.407. 500		-	-	99,66	-		161.1 29.74 0	155.862. 050
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bagi korban kebakaran			100.000.	100.000.				93.498.4	66.488.0		-	-	93,50	-		50.00	39.996.6





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		J	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	Anggaran	Tahun		a-Rata mbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
dan bencana			000	000				00	00							0.000	00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial tidak terencana				110.000. 000					101.596. 600		-	-	-	-		27.50 0.000	25.399.1 50
Pelatihan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana (jitu pasna)											-		-	-		-	-
Pengkajian Kebutuhan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			179.787. 800	197.200. 000				167.916. 200	186.737. 000		-	-	93,40	-		94.24 6.950	88.663.3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9.874. 620.15 0	9.874.72 7.571	10.388.1 17.400	8.575.15 0.400	-	-	5.093.3 72.350	5.417.48 2.250	5.070.1 94.350	-						9.678 .153. 880	3.895.26 2.238
Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1.200.0 00.000	1.200.00 0.000	1.000.00 0.000	1.130.00 0.000			211.890. 100	536.000. 000	39.649.5 00		-	17,66	53,60	-		1.132. 500.0 00	196.884. 900
Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	700.00 0.000	700.000. 000	700.000. 000	1.200.00 0.000			-	-	366.830. 800		-	-	-	-		825.0 00.00 0	91.707.7
Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan	528.52	528.525.	528.525.	528.525.			422.057.	422.057.	497.324.		-	79,86	79,86	-		528.5 25.30	335.359.





#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ran Pada Ta	hun Ke-			Realisasi An <sub>i</sub>	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Ro	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata ımbuhan
2000	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kerja dan lain-lain	5.000	400	400	400			800	800	250							0	963
Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	417.97 2.200	417.972. 200	636.000. 000	536.000. 000			339.876. 200	339.876. 200	517.287. 600		-	81,32	53,44	-		501.9 86.10 0	299.260. 000
Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	360.18 2.200	360.000. 000	600.000. 000	400.000. 000			278.443. 400	278.443. 400	351.791. 600		-	77,35	46,41	-		430.0 45.55 0	227.169. 600
Groundcheck Hotspot Dan atau Informasi	257.94 0.750	257.940. 750	343.000. 000	-			11.940.7 50	11.940.7 50	-		-	4,63	3,48	-		214.7 20.37 5	5.970.37 5
Kampanye Pengendalian Karhutla Melalui Kegiatan di Sekolah			300.000. 000	-				-	-		-	-	-	-		75.00 0.000	-
Analisa Vegetasi bekas lahan terbakar			300.000. 000	300.000. 000				-	16.900.0 00		-	-	-	-		150.0 00.00 0	4.225.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	6.410.0 00.000	6.410.28 9.221	5.980.59 2.000	4.480.62 5.000			3.829.16 4.100	3.829.16 4.100	3.280.41 0.600		-	59,73	64,03	-		5.820. 376.5 55	2.734.68 4.700





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		1	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara R	ealisasi dai Ke-	n Anggaran	Tahun		ta-Rata ımbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	2.013.10 8.700	-	-	-	-	124.3 48.11 9	-	-	-	-	-	2.013 .108. 700	124.348. 119
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (lanjutan)					-						-	-	-	-		-	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)											-	-	-	-		-	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	-	699.823. 000	-	-	-	-	66.60 0.000	-	-	-	-	-	699.8 23.00 0	66.600.0 00
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					550.000. 000					-	-	-	-	-		550.0 00.00 0	-
Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				<b></b>						-	-	-	-	-		-	-
Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		<b></b>									-	-	-	-		-	-





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		1	Realisasi An	ggaran Pada	ı Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata Imbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kabupaten/Kota																	
Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadapa Bencana											-	-	-	-		-	-
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota											-	-	-	-		-	-
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan											-	-	-	-		-	-
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota					149.823. 000					66.600	-	-	-	-		149.8 23.00 0	66.600.0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota											-	-	-	-		-	-
Penyusunan Rencana Kontijensi											-	-	-	-		-	-
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana		l	<u> </u>				ļ				-	-		-		-	-
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana											-	-	-	-		-	-





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	hun Ke-		I	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Ro	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata ımbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	1.113.28 5.700	-	-	-	-	56.79 8.119	-	-	-	-	-	1.113 .285. 700	56.798.1 19
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas											-	-	-	-		-	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota											-	-		-	<b></b>	-	-
Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					499.999. 800					37.080 .000	-	-	-	-		499.9 99.80 0	37.080.0 00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					613.285. 900					19.718 .119	-	-	-	-		613.2 85.90 0	19.718.1 19
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana											-		-	-		-	-
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				4							-	-	-	-		-	-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	200.000. 000	-	-	-	-	950.0 00	-	-	-	-	-	200.0 00.00 0	950.000





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	ihun Ke-		]	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara R	ealisasi dai Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata Imbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											-	-	-	-		-	-
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					200.000. 000					950.00 0	-	-	-	-		200.0 00.00 0	950.000
Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											-	-	-	-		-	-
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan											-	-	-	-		-	-
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana											-	-	-	-		-	-
																-	-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	-	4.413.14 4.738	-	-	-	-	79.78 3.600	-	-	-	-	-	4.413 .144. 738	79.783.6 00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah	-	-	-	-	2.119.47 3.738	-	-	-	-	66.88 8.600	-	-	-	-	-	2.119 .473. 738	66.888.6





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	nran Pada Ta	hun Ke-		I	Realisasi An <sub>i</sub>	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara R	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		a-Rata mbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Kabupaten/Kota																	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota					680.000. 000						-	-	-	-		680.0 00.00 0	-
Pencegahan Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota					400.000. 000						-	-	-	-		400.0 00.00 0	-
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi					139.000. 000						-	-	-	-		139.0 00.00 0	-
Penanganan Bahan Bakar Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota					-						-	-	-	-		-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri					671.948. 338						-	-	-	-		671.9 48.33 8	-
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran											-	-	-	-		-	-





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ran Pada Ta	ihun Ke-		I	Realisasi An <sub>i</sub>	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara Re	ealisasi dar Ke-	n Anggaran	Tahun		ta-Rata ımbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				•	-						-	-	-	-		-	-
Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					228.525. 400					66.888	-	-	-	-		228.5 25.40 0	66.888.6
Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	-	-	200.000. 000	-	-	-	-	12.89 5.000	-	-	-	-	-	200.0 00.00 0	12.895.0 00
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran					200.000. 000					12.895 .000	-	-	-	-		200.0 00.00 0	12.895.0 00
Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran											-	-	-	-		-	-
Penilaian Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran											-	-	-	-		-	-



# NGAY BEACAULT OMERAL

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN		Angga	ıran Pada Ta	ihun Ke-		I	Realisasi An	ggaran Pada	Tahun Ke-		Rasio	antara R	ealisasi dai Ke-	n Anggaran	Tahun		ta-Rata ımbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	-	2.093.67 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.093. 671.0 00	-
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat					525.000. 000						-	-	-	-		525.0 00.00 0	-
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran					200.000. 000						-	-	-	-		200.0 00.00 0	-
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana					1.368.67 1.000						-	-	-	-		1.368. 671.0 00	-



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Adapun program dan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB belum tersedia
- b. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk Perbub juga belum tersedia
- c. Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Perbub 0% persen.
- d. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana belum semua ada disemua kecamatan.
- e. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum memadai baru terpenuhi 71,43 dari kebutuhan 100 persen.
- f. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 54,17 persen.
- g. Desa Tangguh Bencana belum seluruhnya ada. Dari 6474 kampungatau desa yang ada di Kutai Kartanegara 2600 desa 37,07 persen yang baru tersentuh.
- h. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan juga masih nol persen
- i. Rencana Kontijensi Banjir yang seharusnya ada di tiap Kecamatan.
- j. Demikian juga Rencana Kontijensi banjir, Kebakaran Lahan dan Hutan, banjir bandang juga belum memadai seharusnya dimiliki satu minimal oleh setiap Kecamatan
- k. Penentuan Status Tanggap Darurat juga perlu didorong

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan

Dalam lima tahun mendatang, Pemkab Kukar segera menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya saing dan Mandiri). Pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Visi dan Misi KUKAR IDAMAN sebagai grand strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui Visi dan Misi KUKAR IDAMAN penataan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga lebih dimatangkan. Salah satu program ungguan Kukar Idaman yaitu pada



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

sektor pertanian dalam arti luas, yakni pembangunan pertanian yang berbasis kawasan.

Dengan segala potensi yang dimiliki Kutai Kartanegara, Kukar siap berkolaborasi, bersinergi baik dengan pemerintah Desa dan Kecamatan, juga berkolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, stakeholder dan seluruh masyarakat Kukar. Demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, agar tujuan kita membawa Kukar maju dan mensejahterakan masyarakat dapat segera terwujud.

Perangkat Daerah di Kukar agar segera menuangkan visi misi Kukar Idaman dalam rencana kegiatan pembangunan Kukar, sehingga janji – janji yang telah diberikan Kepala Daerah kepada masyarakat dapat terpenuhi. Perlu diketahui didalam visi dan misi KUKAR IDAMAN banyak sekali program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung Visi, Misi, KUKAR IDAMAN Tahun 2021-2026, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas penanggulangan bencana di daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah:

- 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana serta pemahaman terhadap kesiapsiagaan ;
- 2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penanggulangan bencana.
- 4. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;
- 5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih terbuka sangat lebar, banyaknya bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak perubahan paradigma membuat dari tersebut penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam Tahap pra bencana, berupa Program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat bencana, penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal, berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban . Setelah semua teratasi, dimulailah Tahap pasca bencana untuk Rehabilitasi, Rekonstruksi dan pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan pelayanan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 2. Sinkronisasi dan koorBadani lebih optimal dalam yang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pemerintah daerah, pendanaanya.( pusat, kecamatan dan Desa/kelurahan).
- 3. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana.
- 4. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar pastisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang sebelumnya bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajad kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hinggi sendimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
  - a) Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan Kebakaran dan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
  - c) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana-
  - d) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

#### b. Dalam aspek Kelembagaan

- a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
- b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

#### c. Dalam aspek Ketugasan:

- a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
- b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
- c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
- d) Masih minimnya relawan siaga bencana.
- e) Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
- g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

# Tabel. 11 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	a. Belum Optimalnya Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena Terbatasnya Sapras Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		b. Belum Tersedianya Sapras dan Sumber daya manusia (SDM) PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai
		c. Belum dilaksanakannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	a. belum dilakukan Pelatihan dan sertifikasi Keahlian SDM dan penggunaan peralatan PB
		b. Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
		c. Minimnya ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan
		d. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB belum tersistem dan terpadu
		e.Belum semua Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana
		f. Belum semua desa menjadi Desa/Kel Tangguh Bencana
		g. Belum Terpenuhi Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir dan tanah longsor
	Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a.Belum Optimalnya Pelaksanaan dalam penentuan status Tanggap Darurat
		b. Belum Optimalnya Penerapan sistem komando operasi darurat
		c. Masih rendahnya kapasitas petugas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
	Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	a. Belum tersusunnya Peraturan daerah/perkada tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana
		b. Belum terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Sehingga Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Tidak Optimal
		c. Belum memiliki Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana
		d. Belum terinplementasikannya Tataruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana
		e. Belum optimalnya Sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
		f. Belum efektifnya koordinasi Fungsi dan Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)			
Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia	Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	a. Belum optimalnya sapras pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar			
		b.Belum optimalnya petugas dalam mendapatkan diklat pemadam kebakaran			
		c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran			
		d. Belum semua kecamatan tersedia pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai			
	Belum optimalnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	a. Belum tersedianya sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar			
		b. Belum tersedianya Aparatur terlatih dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar			

# 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dalam masa kepemimpinanya adalah "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia'.".

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Misi Ke 5 : "Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan "

Guna mendukung Visi dan Misi Kepala daerah maka Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RPJMD 2021-2026, program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 2 (dua) program, yaitu:

- a) Program Penanggulangan Bencana
- b) Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## 3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai sasaran Stratgis Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis 1: Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Risiko Bencana
- b. Sasaran Strategis 2: Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak
- c. Sasaran Strategis 3: Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana
- d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel, 12. Rencana Strategis BNPB Preriode Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Base	Target (Tahun)					
			line		2021		2023		Keterangan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	144,02	141,14	138,26	135,38	132,50	129,62	Turun 10%
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak	NA		2,5	2,5	2,5	2,5	Turun 10%
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	4,85	5	5,5	6	6,5	7	Capaian nilai rata-rata peningkatan indeks = 7
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,01	76	80	83	87	90	Capaian akhir 90

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup **Stratrgis**

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara harus juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat dari 9 ( sembilan ) satuan fisiografi, dengan diskripsi masing-masing satuan sebagai berikut:

## 1. Daerah rawa pasang surut (Tidak Swamp)

Adalah daerah dataran di tepi pantai yang selalu di pengaruhi oleh pasangsurut air laut dan ditumbuhi hutan mangrove. Bentuk wilayahnya bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi.

## 2. Daerah dataran alluvial (Alluvial Plain)

Adalah daerah dataran yang terbentuk dengan proses pengendapan didaerah muara dan lereng-lereng bukit/pegunungan. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan yariasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 2 ( dua ) meter. Luas satuan dataran alluvial ini adalah 2.251,19 Km² atau 8.62 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 3. Daerah jalur kelokan sungai (Meander Belt),

Adalah daerah jalur meander sungai yang mempunyai tanggul sungai yang lebar. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaaan tinggi kurang dari 2 ( dua ) meter. Luas satuan jalur kelokan sungai ini adalah 1.400,93 Km² atau 5,36 % dari luas wilayah Kutai Kartanegara.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### 4. 8Daerah rawa (Swamp)

Adalah daerah dataran banjir yang selalu tergenang air, rawa bergambut atau dataran banjir berawa di lembah yang sempit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 meter. Luas rawa ini adalah 2.691,71 Km² atau 9,87 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 5. Daerah lembah alluvial (Alluvial Valley)

Adalah daerah dataran di lembah atau di kiri-kanan jalan aliran sungai dengan berbukit atau tidak berbukit. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 2 % dan perbedaan tinggi kurang dari 1 ( satu ) meter. Luas satuan lembah alluvial ini adalah 85,03 Km<sup>2</sup>atau 0,33 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 6. Daerah teras (Terrain)

Adalah daerah berteras, baik yang dipengaruhi laut maupun teras berpasir yang datar dan tertutup gambut yang dangkal atau teras berpasir dengan bentuk wilayah bergelombang. Bentuk wilayah bermorfologi dataran dengan variasi kelerengan kurang dari 8 % dan perbedaan tinggi kurang dari 10 ( sepuluh ) meter. Luas satuan teras ini adalah 880,22 Km<sup>2</sup> atau 3,37 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 7. Daerah dataran (Plain),

Adalah daerah endapan, dataran karst, dataran vulkanik, dataran batuan beku asam dan dataran basalt. Bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit dengan variasi kelerengan kurang dan 2 - 40 % dan perbedaan tinggi kurang dari 50 ( lima puluh ) meter. Luas satuan dataran ini adalah 8.583, 13 Km<sup>2</sup>atau 32,86 % dan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

#### 8. Daerah perbukitan (Hill)

Adalah daerah bukit endapan dan ultra basalt, satuan punggung sendimen,metamorf dan vulkanik yang terpotong dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah bergelombang sampai agak berbukit. Luas satuan perbukitan ini adalah 4.123,64 Km² atau 15,79 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 9. Daerah pegunungan (Mountain)

Adalah daerah gunung endapan basalt dan ultra basalt, gunung batu pasir dengan lereng terpotong, punggung dan gunung karet yang permukaannya tidak rata, satuan punggung granit dan metamorf dan gunung strato vulkanik yang tererosi dengan pola drainase radial. Bentuk wilayah agak berbukit sampai bergunung dengan variasi kelerengan kurang dari 26 % sampai lebih dari 60 % dan perbedaan tinggi lebih dari 300 ( tiga ratus ) meter. Luas satuan pegunungan ini adalah 3.342,31 Km² atau 12,8 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kajian Lingkungan Hidup Stratrgis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) danmengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Adapun yang menjadi fokus dalam RPJMD sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain:

 Pemenuhan target terkait akses sanitasi dengan tetap memperhatikan kondisi ekosistem dalam hal jasa lingkungan hidup penyediaan air dan budaya lokal masyarakat.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 2. Percepatan pemenuhan target mitigasi dan perlindungan masyarakat terhadap bencana diutamakan selaras dengan upaya mempertahankan ekosistem alami.
- 3. Percepatan eliminasi penyakit malaria sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat, terutama daerah rawa. Dengan memperhatikan keseimbangan area bervegetasi alami dan lingkungan terbangun di daerah-daerah ini.
- 4. Percepatan peningkatan pendapatan daerah melalui pariwisata dengan selalu memperhatikan jasa lingkungan hidup kultural dan budaya lokal masyarakat serta mengutamakan skema ekowisata.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

# a. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:

- a) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
- e) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
- f) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

#### b. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:

a) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- b) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat menganggu fungsi kawasan lindung.

# c. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi:

- a) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
- b) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
- c) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
- d) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
- e) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.

# d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:

- mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan

# TOWN AND AN OFFICE OF THE PROPERTY OF THE PROP

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

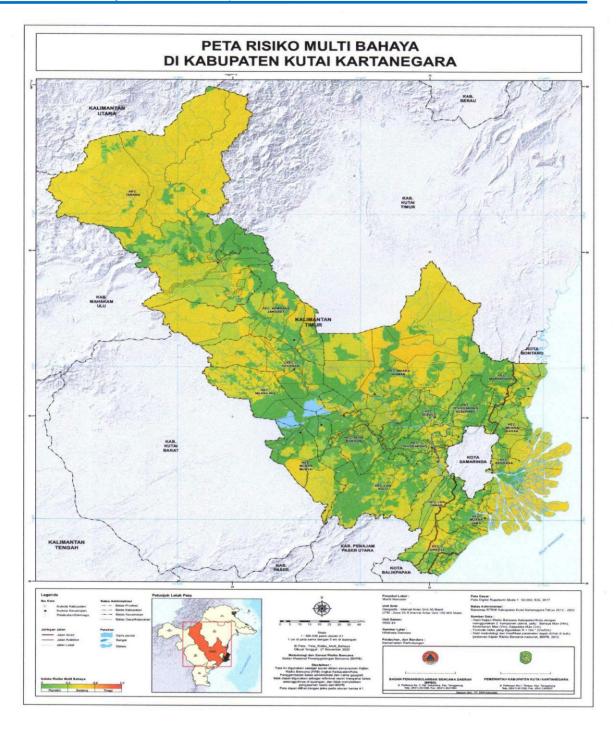
keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Dalam melengkapi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penanggulangan bencana, disajikan Peta Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Gambar 2 dibawah ini :



Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar. 2 Peta Risiko Multi Bahaya Kabupaten Kutai Kartanegara



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### 3.5. Penentuan Isu - Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu - isu strategis penanggulangan bencana:

### 3.5.1. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, yaitu belum optimalnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjelasan atas isu tersebut adalah:

- a. Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana .
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- d. Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- e. Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

### 3.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan

Isu dan permasalahan penanggulangan daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan Meningkatkan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

karena Terbatasnya Sapras Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat, Menyediakan Sapras PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai dan Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;

- 2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB, Menyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan, Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan, Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB, Mensosialisasikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana, Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana, dan Menyediakan sarana dan prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana Banjir dan tanah longsor
- 3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan cara Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat, Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat dan Meningkatnya kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
- 4. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan cara Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana, Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana, Mengintegrasikan rencana Tataruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Mengoptimalkan sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan, dan Meningkatkan koordinasi Fungsi dan Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir
- 5. Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dengan cara Meningkatkan sapras pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Meningkatkan jumlah pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai di kecamatan
- 6. Peningkatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan cara Memenuhi sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar dan Melatih Aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

# 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2021-2026, adalah :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana dengan sasaran
  - a. Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana
  - b. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - c. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Dan Eyakuasi Korban Bencana
  - d. Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 2. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia dengan sasaran
  - a. Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
  - b. Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2021-2026 pada Tabel T-C. 25 di dibawah ini :





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel. 13

T-C.25

### Tujuan, Sasaran Jangka menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD  2020 (realisasi)	TAR 2021 (target)	2022   2023   2024   2025   2026					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana		Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Nilai IKM	76,67	77,50	78	78,90	79,50	80	82	82
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	3,50%	5,11%	8,11%	12,11%	15,11%	18,11%	21,11%	24,61%
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	6,55%	8,55%	10,55%	13,55%	16,55%	19,55%	22,55%	29,10%





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2	10
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta		Indeks kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Nilai IKM	Na	Na	63	65	67	70	72	72





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TAR	GET KINEF	RJA TUJUAN/	SASARAN P	ADA TAHU	KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	7,14%	10,86%	12,21%	15,80%	17,55%	19,25%	20,12%	27,26%
			Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Persen	31,22%	33,76%	35,44%	41,77%	50,21%	60,76%	73,42%	73,42%





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD  2020 (realisasi)	TAR  2021 (target)	GET KINE	RJA TUJUAN/ 2023	SASARAN P.	2025	N KE 2026	KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah , dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra melalui Metode Analisis SWOT, yaitu *Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), and Threats (T).* Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsiasumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 14. Faktor Internal dan Eksternal.

	Faktor Int	ernal			Faktor Ekternal
	Kekuatan (Stre	ngth = S)			Peluang (Opportunities = 0)
1.	Memiliki aparatur ya	ng komitmen	dalam	1.	Sesuai dengan Undang - Undang No.23 Tahun
	menjalankan tuga:	dan	fungsi		2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa
	penanggulangan bencar	a.			urusan ketertiban umum, ketentraman dan
2.	Telah memiliki sarana	dan prasarana	a dalam		perlindungan masyarakat merupakan urusan
	menjalankan tuga:	dan	fungsi		wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

penanggulangan bencana.

- 3. Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana
- 4. Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dana komunikasi melalui HT.
- dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.
- Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya(pemerintah pusat, daerah,kecamatan dan Desa/kelurahan).
- Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
- 4. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.

#### Kelemahan (Weaknesess = W

- 1. Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas
- 2. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai
- 3. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional
- 4. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC
- 5. Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap

### **Tantangan (Threats = T)**

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana
- 4. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;
- 5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Faktor internal dan eksternal yang telah disajikan pada Tabel 4.2. selanjutnya diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor. Setelah diperoleh nilai untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan penghitungan matriks internal dan matriks eksternal.

Tabel 15. Penghitungan Bobot dan Rating

	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Kekuatan (S) :			
1	Memiliki aparatur yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.	25%	2.80	0.70
1	Kualitas sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana	25%	3.20	0.80





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.	Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana	30%	2.40	0.72
4.	Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dana komunikasi melalui HT.	20%	2.40	0.48
	Jumlah	100%	10.80	2.70
Ke	lemahan (W)			
1.	Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas	25%	2.60	0.65
2.	Jumlah Sarana dan prasarana yang masih terbts	25%	3.20	0.80
3.	Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional	15%	2.80	0.42
4.	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC	20%	2.60	0.52
5.	Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap	15%	2.60	0.39
	Jumlah	100%	13.80	2.78
	Faktor Ekternal			
	Peluang (0):			
1.	Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.	30%	3.40	1.02
2.	Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya (pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)	25%	3.20	0.80
3.	Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.	20%	2.60	0.52
4.	Partisipasi dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.	25%	3.00	0.75
	Jumlah	100%	12.20	3.09
An	caman/Tantangan (T)			
1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;	20%	2.40	0.48
2.	Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.	30%	3.20	0.96
3.	Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana	20%	2.80	0.56



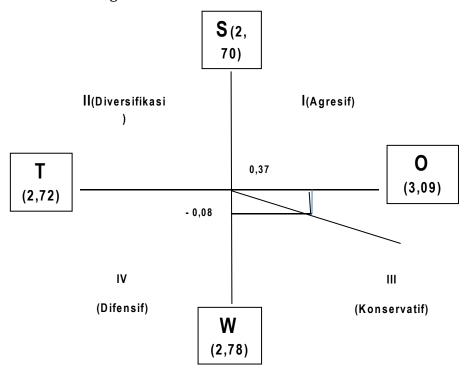
#### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

4.	Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;	15%	2.20	0.33
5.	Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif	15%	2.60	0.39
	Jumlah	100%	13.20	2.72
			S-W	-0.08
			O-T	0.37

Nilai matriks evaluasi internal adalah Total Kekuatan (S) - Total Kelemahan (W) = 2,70 - 2,78 = -0,08. Sementara itu, Nilai matriks evaluasi eksternal adalah Total Peluang (O) - Total Ancaman (T) = 3,09-2,72 = 0,37. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut:

Gambar. 3. Diagram SWOT



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III: Memiliki peluang yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi yang dikembangkan yaitu strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-0).

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel.16.

# T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

VISI	"Mewujudkan Masyara	an Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"									
MISI KE 5	Meningkatkan Pengelo	olaan Sumber Daya Al	am yang Berwawasan Lingkungan								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Meningkatkan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana karena Terbatasnya Sapras Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat Menyediakan Sapras PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan								
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	sertifikasi penggunaan peralatan PB Menyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB Mensosialisasikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana Menyediakan sarana dan prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana								
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Banjir dan tanah longsor Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat Meningkatnya kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana								
	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Membentuk dan mengoptimalkan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana Mengintegrasikan rencana Tataruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana Mengoptimalkan sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Meningkatkan koordinasi Fungsi dan								





Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI	"Mewujudkan Masyara	akat Kutai Kartanegara yan	ng Sejahtera dan Berbahagia"
MISI KE 5	Meningkatkan Pengelo	olaan Sumber Daya Ald	am yang Berwawasan Lingkungan
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir
			Meningkatkan sapras pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar
	Meningkatnya kualitas	Peningkatan Kualitas	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelenggaraan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran
			Meningkatkan jumlah pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai di kecamatan
Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia	Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan	Peningkatan Penyelenggaraan operasi	Memenuhi sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar
	pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Melatih Aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaraadalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.





Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah rencana strategis agar dapat berjalan optimal dalam mencapai sasaran/tujuan selama 5 ( lima ) tahun ke depan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap sub kegiatan. Secara umum strategi dalam mencapai visi dan misi dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan dan sub kegiatan strategis sebagai berikut:

### I. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (lanjutan)
  - 2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2. Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 4. Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadapa Bencana
- 5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 6. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 7. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- 8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 9. Penyusunan Rencana Kontijensi
- 10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana
- 11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

### c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 4. Kabupaten/Kota
- 5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

### d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 4. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- 5. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

# II. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi
  - 3. Penanganan Bahan Bakar Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
- 5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- 6. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- 7. Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

### b. Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran

- 1. Pendataan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran
- 2. Penilaian Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran

### c. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat
- 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran
- 3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana

### d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- 1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### Tabel 17.

# T-C. 27

### Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

			Indikator Kinerja,							Target K	inerja Program o	dan Kerangka P	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	20	025	2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkat nya Transparan si dan Akuntabilit as Kinerja Pembangu nan	Meningka tnya Transpara nsi dan Akuntabili tas Kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	В	В	16.408.683 .145	В	16.281.183.1 45	B+	16.831.18 3.145	B+	16.281.18 3.145	B+	16.705.372 .296	B+	82.507.604 .876		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokume n	9	9	450.000.00 0	9	450.000.000	9	450.000.0 00	9	450.000.0 00	9	450.000.00 0	45	2.250.000. 000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	200.000.00	7	200.000.000	7	200.000.00	7	200.000.00	7	200.000.00	35	1.000.000.0 00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDDokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.000.00	1	100.000.000	1	100.000.00	1	100.000.00	1	100.000.00	5	500.000.00 0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	150.000.00 0	1	150.000.000	1	150.000.00 0	1	150.000.00 0	1	150.000.00 0	5	750.000.00 0		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	114	114	9.701.750. 195	114	9.701.750.19 5	114	9.701.750. 195	114	9.701.750. 195	114	9.475.939. 346	570	48.282.940 .126		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,		Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja					
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	2022		2023	2	2024	2	025	2	2026	period	erja pada akhir e Renstra kat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan Gaji dannTunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bu lan	88	88	9.261.750. 195	88	9.261.750.19 5	88	9.261.750. 195	88	9.261.750. 195	88	9.035.939. 346	440	46.082.940. 126		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	14	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	70	400.000.00 0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem es teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semes teran SKPD	Laporan	12	12	360.000.00 0	12	360.000.000	12	360.000.00	12	360.000.00	12	360.000.00	60	1.800.000.0		
		Administrasi	Jumlah Dokumen	Dokume												l			
		Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian	n	0	175	340.000.00 0	25	150.000.000	175	400.000.0 00	25	150.000.0 00	175	400.000.00 0	575	1.440.000. 000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	Unit	150	150	250.000.00	0	-	150	300.000.00	0	-	150	300.000.00	450	850.000.00 0		
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Orang	-	-	-	15	150.000.000		-	15	150.000.00 0			30	300.000.00 0		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	25	25	90.000.000		-	25	100.000.00		-	25	100.000.00	75	290.000.00		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Orang	-	-	-	10	150.000.000	-	-	10	150.000.00	-	-	20	300.000.00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat	Layanan	150	150	843.500.00 0	150	933.500.000	150	933.500.0 00	150	933.500.0 00	150	933.500.00	750	4.577.500. 000		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Camaian					Target k	Cinerja Program	dan Kerangka F	Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	2022		2023	2	024	2	025	2	2026	period	erja pada akhir e Renstra kat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah																
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	500	52.500.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	1700	1700	110.000.00	1700	110.000.000	1700	110.000.00 0	1700	110.000.00	1700	110.000.00	8500	550.000.00 0		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	120	120	50.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	600	310.000.00 0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis/Por si/Kotak	2890	2890	75.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.00	2890	100.000.00	2890	100.000.00	14450	475.000.00 0		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Buku/Le mbar/Bu ah	7500	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	37500	425.000.00 0		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dan advetorial yang disediakan	Eksempla r/Buku/K ali	2190	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	10950	290.000.00 0		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Ka li	35	35	330.000.00 0	35	330.000.000	35	330.000.00 0	35	330.000.00 0	35	330.000.00 0	175	1.650.000.0 00		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengelolaan arsip (UPPA) serta pada Unit kearsipan (UK)	Berkas	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.00	100	100.000.00	100	100.000.00	500	475.000.00 0		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Canalan					Target K	inerja Program o	dan Kerangka Po	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	20	)25	2	026	periode	rja pada akhir e Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat daerah	Sistem/A plikasi	12	12	50.000.000	10	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	350.000.00 0	20	21
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit/Kali	165	50	200.000.00	90	150.000.000	200	450.000.0 00	90	150.000.0 00	215	550.000.00 0	645	1.500.000. 000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	-	-	90	150.000.000	90	150.000.00 0	90	150.000.00 0	90	150.000.00 0	360	600.000.00 0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabi litasi	Unit/Kali	75	50	200.00Q0. 000	-	-	110	300.000.00 0	-	-	125	400.000.00 0	285	900.000.00 0		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	4.193.432. 950	12	4.155.932.95 0	12	4.155.932. 950	12	4.155.932. 950	12	4.155.932. 950	60	20.817.164 .750		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	990	990	5.000.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	4950	35.000.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	12	12	298.000.00 0	12	258.000.000	12	258.000.00 0	12	258.000.00 0	12	258.000.00 0	60	1.330.000.0 00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Bulan	12	12	3.890.432. 950	12	3.890.432.95 0	12	3.890.432. 950	12	3.890.432. 950	12	3.890.432. 950	60	19.452.164. 750		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit/Kali	150	140	680.000.00 0	150	740.000.000	150	740.000.0 00	150	740.000.0 00	150	740.000.00 0	740	3.640.000. 000		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Carraina					Target K	inerja Program o	dan Kerangka P	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	2	025	2	026	periode	erja pada akhir e Renstra eat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	Unit	90	80	600.000.00	90	650.000.000	90	650.000.00 0	90	650.000.00 0	90	650.000.00 0	440	3.200.000.0 00		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit/Kali	60	60	80.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	300	440.000.00 0		
Meningkat nya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1		12,1		15,1		18,1		21,1		24,61		BPBD	
Informasi Pencegaha n, Kesiapsiaga an dan	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2) Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6	3.025.000.	13,6	3.215.000.00	16,6	3.225.000.	19,6	3.200.000.	22,6	3.175.000.	29,1	15.840.000		
Penangana n Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	000	100	0	100	000	100	000	100	000	100	.000		
			4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokume n	0	2		2		2		2		2		10			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1	150.000.00 0	12,1	150.000.000	15,1	200.000.0 00	18,1	150.000.0 00	21,1	150.000.00 0	24,61	800.000.00 0		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (lanjutan)	jumlah dokumen	Dokumen	1	-	-	-	-	1	200.000.00					1	200.000.00		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi	Orang	-	150	150.000.00 0	150	150.000.000	-	-	150	150.000.00 0	150	150.000.00 0	600	600.000.00		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,		Data Capaian					Target K	inerja Program o	dan Kerangka P	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	2	025	2	2026	period	rja pada akhir e Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6	925.000.00 0	13,6	965.000.000	16,6	925.000.0 00	19,6	950.000.0 00	22,6	925.000.00 0	29,10	4.690.000. 000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	Dokumen	-		-		-	-	-	1	300.000.00			1	300.000.00 0		
		Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan	Orang	-	150	150.000.00 0	150	150.000.000	150	150.000.00 0		-	150	150.000.00 0	600	600.000.00		
		Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah status tanggap darurat bencana	status	-	1	150.000.00 0	1	-		150.000.00 0		-	1	150.000.00 0	3	450.000.00 0		
		Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadapa Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana	Jenis	-	30	175.000.00 0		-	30	175.000.00 0		-	30	175.000.00 0	90	525.000.00 0		
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana di daerah	bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-		
		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Destana	12	4	200.000.00	4	200.000.000	4	200.000.00	4	200.000.00	4	200.000.00	20	1.000.000.0		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	kejadian		20	100.000.00	20	100.000.000	20	100.000.00	20	100.000.00	20	100.000.00	100	500.000.00		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Rekasi Cepat (TRC)	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen		1	150.000.00 0	1	200.000.000	1		1	200.000.00	1	-	5	550.000.00 0		
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Peserta Gladi	Orang	-	-	-	100	15.000.000	100	150.000.00 0	100	150.000.00 0	100	150.000.00 0	400	465.000.00 0		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	300.000.00 0		
 I																	İ		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Caralian					Target K	inerja Program (	dan Kerangka Pe	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	20	25	2	026	periode	rja pada akhir e Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	-	100%	1.350.000. 000	100%	1.350.000.00 0	100%	1.350.000. 000	100%	1.350.000. 000	100%	1.350.000. 000	100%	6.750.000. 000		
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	persen	-	100%	150.000.00 0	100%	150.000.000	100%	150.000.00 0	100%	150.000.00 0	100%	150.000.00 0	100%	750.000.00 0		
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	-	100%	150.000.00 0	100%	150.000.000	100%	150.000.00 0	100%	150.000.00 0	100%	150.000.00 0	100%	750.000.00 0		
		Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	persen	100%	100%	450.000.00 0	100%	450.000.000	100%	450.000.00 0	100%	450.000.00 0	100%	450.000.00 0	100%	2.250.000.0 00		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam Penyediaan Logstik untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	100%	100%	250.000.00 0	100%	250.000.000	100%	250.000.00 0	100%	250.000.00 0	100%	250.000.00 0	100%	1.250.000.0		
	-	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	persen	-	100%	100.000.00	100%	100.000.000	100%	100.000.00	100%	100.000.00	100%	100.000.00	100%	500.000.00 0		
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap bencana non alam epidemi/wabah penyakit (%)	persen	-	100%	250.000.00 0	100%	250.000.000	100%	250.000.00 0	100%	250.000.00 0	100%	250.000.00 0	100%	1.250.000.0 00		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokume n	-	2	600.000.00	2	750.000.000	2	750.000.0 00	2	750.000.0 00	2	750.000.00 0	10	3.600.000. 000		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Capaian					Target K	inerja Program (	dan Kerangka P	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan	20	022		2023	20	024	20	025	2	026	periode	rja pada akhir e Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penyusunan perbub RAD PB, sumber daya bantuan PB dll.	Dokumen	-	3	100.000.00	3	100.000.000	3	100.000.00	3	100.000.00	3	100.000.00	15	500.000.00 0		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Risiko Bencanana	Forum	-	2	100.000.00 0	2	100.000.000	2	100.000.00 0	2	100.000.00	2	100.000.00 0	10	500.000.00 0		
		Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penaggulangan bencana.	kegiatan	-	3	100.000.00	3	100.000.000	3	100.000.00	3	100.000.00	3	100.000.00	15	500.000.00 0		
		Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Sistim informasi geografis (SIG),	sistem	-	2	150.000.00 0	2	150.000.000	2	150.000.00 0	2	150.000.00 0	2	150.000.00	10	750.000.00 0		
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.Pengawasan sumber ancaman / bahaya.2 pengawasan kegiatan rancang bangun dan tata ruang.3 pengawasan pengelolaan keuangan / pendanaan penanggulangan bencana.4 pengawasan kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. 5. pengawasan kegiatan reklamasi.	kegiatan	-	3	150.000.00	3	300.000.000	3	300.000.00	3	300.000.00	3	300.000.00	15	1.350.000.0		
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Penanggula	Meningka tnya penyeleng garaan operasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	persen	10,86	12,21%	3.265.039. 638	15,80%	3.240.039.63 8	17,55%	3.490.039. 638	19,25%	3.490.039. 638	20,12%	3.240.039. 638	27,26%	16.725.198 .190		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,		Data Capaian					Target K	inerja Program (	dan Kerangka Pe	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan	20	022		2023	20	024	20	025	2	026	periode	rja pada akhir Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1 ngan	2 pencarian	4 KEBAKARAN DAN	5 layanan Wilayah	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kebakaran	dan pertolong	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Manajemen Kebakaran (WMK)																
	an terhadap kondisi membaha yakan manusia	NON REDAKARAN	2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			3) Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)		33,76%	35,44%		41,77%		50,21%		60,76%		73,42%		73,42%			
			4) Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	10,86	12,21%	2.040.039. 638	15,80%	2.040.039.63 8	17,55%	2.290.039. 638	19,25%	2.040.039. 638	20,12%	2.040.039. 638	27,26%	10.450.198 .190		
			2) Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100	100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	Jumlah Kasus	76	20%	825.000.00 0	20%	825.000.000	20%	825.000.00 0	20%	825.000.00 0	20%	825.000.00 0	100%	4.125.000.0 00		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja,		Data Caralian					Target k	(inerja Program (	dan Kerangka P	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	2024	2	025	2	026	periode	erja pada akhir e Renstra eat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian kebakaran	Jumlah Korban	74	20%	200.000.00	20%	200.000.000	20%	200.000.00	20%	200.000.00	20%	200.000.00	100%	1.000.000.0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulagan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	unit		120	690.039.63 8	75	690.039.638	110	690.039.63 8	75	690.039.63 8	110	690.039.63 8	490	3.450.198.1 90		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Apartur Pemadam yang dibina	orang		100	125.000.00 0		125.000.000	50	125.000.00 0		125.000.00 0	50	125.000.00 0	200	625.000.00 0		
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.tersedi annya sistem						1	250.000.00 0					1	250.000.00 0		
		Penyelengaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya kerjasama antar wilayah perbatasan	wilayah			200.000.00	1	200.000.000	2	200.000.00	1	200.000.00	1	200.000.00	5	1.000.000.0		
		Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen			-		150.000.000		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.00 0	-	600000000,		
		Pendataan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana protksi kebakaran yang didata	Unit			-	100	150.000.000			100	150.000.00 0			200	300.000.00 0		
		Penilaian Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana protksi kebakaran yang	Unit			-			100	150.000.00 0			100	150.000.00 0	200	300.000.00 0		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,		Data Capaian					Target K	inerja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan	2	022		2023	2	024	20	25	2	026	periode	rja pada akhir Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	dinilai  Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen	33,76%	35,44%	1.025.000. 000	41,77%	850.000.000	50,21%	850.000.0 00	60,76%	850.000.0 00	73,42%	850.000.00 0	73,42%	4.425.000. 000		
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	Kelompo k Balakarca na	46	7	350.000.00 0	10	350.000.000	10	350.000.00 0	10	350.000.00 0	10	350.000.00 0	47	1.750.000.0 00		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk	Kelompo k Balakarca na	72	4	200.000.00	10	200.000.000	10	200.000.00	10	200.000.00	10	200.000.00	44	1.000.000.0		
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	unit	6	9	475.000.00 0	5	300.000.000	5	300.000.00 0	5	300.000.00 0	5	300.000.00 0	29	1.675.000.0 00		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	3) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen		100%	200.000.00	100%	200.000.000	100%	200.000.0	100%	450.000.0 00	100%	200.000.00	100%	1.250.000. 000		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang tertangani	persen				25%	200.000.000	25%	200.000.00	25%	200.000.00 0	25%	200.000.00	100%	800.000.00		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit		50	200.000.00 0	100				100	250.000.00 0			250	450.000.00 0		





### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,		Data Capaian					Target Ki	inerja Program (	dan Kerangka Po	endanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Program (outcome), Kegiatan, dan Sub	Satuan	pada Tahun Awal Perencanaan	20	022		2023	20	024	20	025	2	026	periode	rja pada akhir Renstra at Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan (output)			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pertolongan terhadap	Pencarian																
		Kondisi Membahayakan	Pertolongan																
		Manusia/Penyelamatan	terhadap kondisi																
		dan Evakuasi	membahayakan																
			Jumlah				22.698.7 22.783		22.736.22 2.783		23.546. 222.783		22.971. 222.783		23.120.4 11.934		115.072. 803.066		

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana strategis BPBD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu *Mewujudkan* Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Kontribusi setiap Perangkat Daerah tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja Perangkat Daerah , sehingga capaian setiap Perangkat Daerah akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, BPBD memiliki peran untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mewujudkan kebijakan Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel T-C. 28 dibawah ini :



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel.18

T-C. 28

### Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaia	n Setiap Tahu	ın		Kondisi Kinerja pada
		Tahun 0	<b>Tahun</b> 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun</b> 2026	akhir periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	76,67	77,50	78	78,90	79,50	80	82	82
2	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	3,50%	5,11%	8,11%	12,11%	15,11%	18,11%	21,11%	24,61%
3	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6,55%	8,55%	10,55%	13,55%	16,55%	19,55%	22,55%	29,10%
4	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	-	-	2	2	2	2	2	10
6	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	7,14%	10,86%	12,21%	15,8%	17,55%	19,25%	20,12%	27,26%





Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaia	n Setiap Tahu	ın		Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	<b>Tahun</b> 2026	RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	31,22%	33,76%	35,44%	41,77%	50,21%	60,76%	73,42%	73,42%
9	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang Penanggulangan Bencana / Urusan Bencana untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Rencana Strategis ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

### a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

- 1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
- 2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
- 3. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penganganan bencana di daerah.
- 4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

### b. Kaidah - kaidah pelaksanaan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

### c. Rencana tindak lanjut

Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimasa yang akan datang. Bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penanggulangan Bencana dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !!!!!!!!

Salam Tangguh.....

Tenggarong, S

AH KABU Kepala Pelaksana,

September 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ors. H. MARSIDIK

MP. 19620403 198703 1 020